

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak bergulir era reformasi pasca kejatuhan rezim orde baru, Indonesia mulai membenahi berbagai macam aspek kebangsaan dan kenegaraan. Banyak berbagai macam perubahan yang sangat signifikan dengan banyak bermunculan aturan-aturan baru yang dianggap pro terhadap demokrasi. Salah satu aturan yang dikeluarkan adalah amandemen Undang-Undang Dasar Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 4 terkait pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan secara demokratis. Selain itu pemerintah juga terus menyempurnakan aturan-aturan terkait pelaksanaan peraturan daerah yang dikeluarkan di era reformasi. Aturan terbaru tentang pemerintahan daerah yang telah dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu tujuan adanya Undang-Undang ini adalah agar terselenggaranya otonomi daerah dimana pemerintah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan terkait pemilihan kepala daerah yang selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kemudian pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan berbagai hal terkait tata cara pemilihan Kepala Daerah dimulai dari tahap pendaftaran calon hingga penetapan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih. Selain itu Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa asas pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, rakyat dapat memilih figur kepala daerahnya yang dipercaya untuk mengurus daerahnya sesuai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

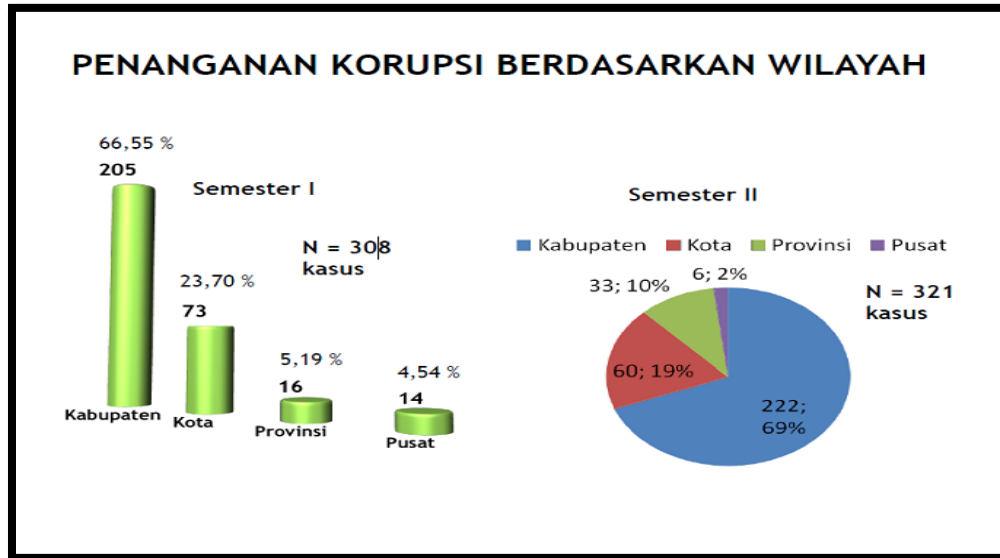
Dengan banyaknya aturan-aturan yang mengatur pemerintah daerah maka pemerintahan daerah dapat menjalankan berbagai kegiatan baik pemilihan Kepala

Daerah maupun pengimplementasian otonomi daerah lainnya. Sayangnya dalam pengimplentasiannya (kebijakan otonomi daerah), banyak menemui berbagai macam kejanggalan baik ditingkatan pemilihan Kepala Daerah, maupun kinerja pemerintah daerah sendiri. Dalam lingkup pemilihan kepala daerah, banyak para kandidat kepala daerah yang melakukan tindakan negatif seperti *black campaign*, hingga *money politic*. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman bahkan mengakui adanya praktek *money politic* di berbagai daerah pada saat hajjat akbar Pilkada serentak tahun 2015 lalu.¹ Selain itu juga salah satu tahapan Pilkada yang sering terjadi konflik di dalamnya adalah tahapan pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan banyak Kepala Daerah yang bermasalah salah satunya terjerat kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kasus korupsi terbesar terjadi dalam lingkup pemerintah daerah. Selain itu ICW juga menyatakan sepanjang 2014, ada 43 Kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi. Data tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut :

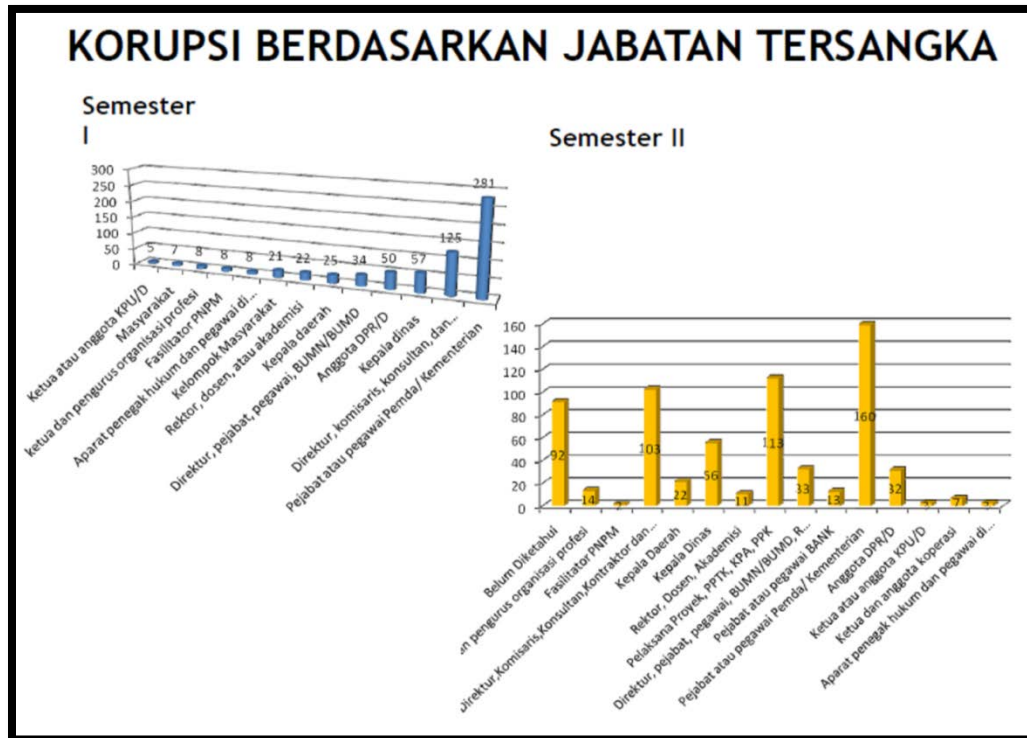
¹ Kompas.com, KPU Akui Ada "Money Politic" dalam Pilkada, tetapi..., Rabu, 9 Desember 2015. Di akses pada Jumat, 29 Juli 2016 20.13

Gambar 1.1 Diagram Penanganan Korupsi Berdasarkan Wilayah



Sumber : Trend Korupsi 2014, ICW

Gambar 1.2 Diagram Korupsi Berdasarkan Jabatan Tersangka



Sumber : Trend Korupsi 2014, ICW

Selain data dari ICW, menurut Kementerian Dalam Negeri terdapat 343 Kepala Daerah yang berperkara hukum baik di Kejaksaan, kepolisian, mau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah.² Hal tersebut menjadi rapor merah bagi kinerja pemerintah daerah khususnya untuk kepala daerah.

Dengan adanya catatan buruk tersebut, sangat perlu adanya perubahan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menuntaskan segala permasalahan. Perubahan tersebut harus diawali oleh sosok pemimpin terlebih dahulu yang memang tidak memiliki permasalahan. Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi perubahan yang nyata, dengan kata lain daerah harus memiliki pemimpin yang transformatif, yang dapat merubah kondisi daerah secara nyata. Seorang pemimpin yang transformatif memiliki komitmen baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan, serta lebih mementingkan sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pemimpin transformatif akan menjalankan kepemimpinan yang transformasional.

Fenomena kepemimpinan di ranah kedaerahan yang terjadi di Indonesia pada saat ini mulai memperlihatkan para pemimpin-pemimpin daerah yang transformatif. Beberapa kepala daerah yang dianggap telah menjalankan kepemimpinan

² Kompas.com, Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum, Rabu, 4 Februari 2015. Diakses pada Senin, 13 Juni 2016 pukul 21.34

transformasional diantaranya wali kota Surabaya Tri Rismaharini yang berlatarbelakang birokrat. Di kota Bandung, Muhammad Ridwan Kamil dengan latar belakang seorang arsitek dipercaya memimpin kota Kembang tersebut. Jauh dari hiruk pikuk kota-kota besar di pulau Jawa, terdapat seorang Profesor bidang Agrikultur yang dipercaya sebagai bupati kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Salah satu kepala daerah yang juga dianggap melakukan sebuah transformasi adalah Enthus Susmono, bupati kabupaten Tegal periode 2014-2019. Sebelumnya Enthus Susmono berhasil memenangkan Pilkada kabupaten Tegal tahun 2013. Enthus Susmono dengan pasangannya Umi Azizah yang diusung hanya oleh Partai Kebangkitan Bangsa tanpa ada koalisi memenangkan pemilu dengan meraup suara sebanyak 233.313 suara (35,21%), mengungguli para kompetitornya³. Tidak hanya memenangkan Pilkada kabupaten Tegal, Enthus-Umi juga mendapatkan penghargaan dari Lembaga Penghargaan Indonesia dan Dunia (LEPRID). Penghargaan tersebut diberikan kepada Enthus-Umi karena dianggap selama masa Pilkada tidak melakukan *money politic*, tidak melakukan kecurangan dan pelanggaran pidana Pemilu. Enthus-Umi juga merupakan pasangan yang secara finansial dianggap lemah dibandingkan dengan calon yang lain. Penghargaan juga diberikan LEPRID kepada Ki Enthus

³ Tribunnews.com Senin, 4 November 2013, di akses pada Senin, 15 Februari 2016.

Susmono karena dia merupakan dalang wayang profesional yang pertama menjadi Bupati di Indonesia.⁴

Ki Enthus Susmono sudah sangat tersohor sebagai seorang dalang wayang. Kesohorannya tidak hanya di wilayah Tegal saja, tetapi juga di wilayah-wilayah yang secara geografis dekat dengan Tegal, maupun daerah-daerah di Jawa Tengah. Yang menarik darinya dan paling menonjol adalah gaya bermain wayangnya yang *nyeleneh*, dan bisa dikatakan diluar pakem pewayangan. Sejatinya wayang adalah salah satu bentuk drama dan teater yang paling rumit dan halus, yang secara terus-menerus dikembangkan oleh satu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya.⁵ Dengan kata lain, lakon wayang yang digerakan dan diatur oleh seorang dalang harus diperagakan dengan halus. Inilah yang tidak dilakukan oleh Ki Enthus Susmono, dia memainkan peran wayang dengan teknik dan gaya yang berbeda, yakni dengan gaya yang *nyeleneh*, dan tak jarang mengeluarkan kata-kata yang diluar kesopanan. Selain itu wayang yang digunakan juga tidak melulu seperti wayang kulit atau golek (sejenis boneka yang terbuat dari kayu) pada umumnya yang mengisahkan Ramayana atau Mahabharata, tetapi wayang yang telah dibuat dan dimodifikasi sesuai dengan karakter yang diinginkan dalang. Namun demikian, hal itulah yang menjadi daya tarik bagi penonton, dan juga pementasan wayang yang dilakukan Ki Enthus tetap

⁴ Mediarakyat99.com, LEPRID Beri Penghargaan Enthus-Umi Atas Prestasi Saat Pilkada Kab.Tegal, Jumat 22 November 2013. Diakses pada Senin, 13 Juni 2016 Pukul 21.36.

⁵ Syarifuddin Usman MHD – Isnawita Din, Wayang (Kepribadian Luhur Jawa), 2010, Penerbit Cakrawala, hal. 12.

memberikan pesan moral dan nilai hiburan sesuai dengan tujuan dari pertunjukan wayang pada umumnya.

Kini dengan kepiawaian memainkan perannya sebagai dalang, Ki Enthus Susmono mengaplikasikan hal tersebut kedalam roda kepemimpinannya. Di awal kepemimpinannya, Ki Enthus langsung mengeluarkan *statement* yang *nyeleneh*, dia menyatakan "bupatinya bupati sampah. kabupatennya kabupaten rongsok."⁶ Pernyataan tersebut keluar pada tanggal 7 November 2013, 4 hari setelah pasangan Enthus – Umi dinyatakan berhasil mengungguli rival-rivalnya. Apa yang disampaikan Ki Enthus tersebut dimaksudkan adalah bagaimana kepemimpinannya nanti akan membuat kebijakan tentang pengolahan dan pengelolaan sampah. Apa yang disampaikannya merupakan buah pikir yang berasal dari pengalamannya saat di tahan di penjara selama 2,5 bulan akibat ulahnya melakukan perusakan pagar Kantor Radio Citra Pertiwi FM, Slawi.

Beberapa bulan setelah memimpin, beberapa gebrakannya mulai bermunculan dan banyak diliput oleh media baik lokal maupun nasional. Tindakan *nyeleneh* lainnya oleh Ki Enthus adalah dengan melantik PNS baru di pemakaman. Dalihnya adalah agar para PNS baru tersebut ingat mati, sehingga mereka berhati-hati dalam bekerja. Selain di pemakaman, Ki Enthus juga melantik para PNS di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya hampir sama, yakni agar para PNS baru tersebut berhati-

⁶ Tempo.co, Enthus Bupati 'Sampah', Tegal Kabupaten 'Rongsok', Jum'at, 08 November 2013. Di akses pada Senin, 13 Juni 2016 pukul 10.21.

hati dalam bekerja karena posisi mereka merupakan pelayan publik. Di lain kesempatan, Ki Enthus juga melantik Direktur baru PDAM ditempat penampungan air, penandatungannya pun dilakukan secara tidak wajar, yaitu dibawah meja. Untuk mengawasi kinerjanya, Ki Enthus juga telah melakukan perjanjian dengan KPK dan BPK untuk mengawasi kinerjanya terutama dalam hal keuangan. Hal *nyeleneh* lainnya yang dilakukan Ki Enthus adalah terkait bagaimana dia mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di kabupaten Tegal. Dia menyatakan bahwa siapa saja yang akan bercerai, harus menemuinya terlebih dahulu untuk diberikan wejangan. Bagi yang membatalkan perceraianya, akan diberikan *reward* berupa uang dari Ki Enthus, namun ada juga yang tetap ingin bercerai. Ki Enthus juga memiliki empat program unggulan yang dinamakan Empat Cinta, yakni : cinta pelayanan publik, cinta produk lokal, cinta desa, dan cinta budaya.

Apa yang telah dilakukan oleh Ki Enthus merupakan hal baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya. Keinginan Ki Enthus untuk merubah daerah yang pernah tercatat sebagai kabupaten terkorup se-Jawa Tengah oleh Komite Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) pada 2013 dilakukannya dengan cara-cara baru. Dalam sebuah *talk show*, Ki Enthus menyampaikan ada salah satu misi yang ingin dicapainya, yaitu merubah perilaku dan kebiasaan buruk yang sudah mengakar di tataran pemerintahan Kabupaten Tegal, sehingga kedepannya akan muncul sebuah paradigma baru yang

baik dimana para pejabat publik dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam skripsi ini peneliti akan meneliti kepemimpinan Ki Enthus Susmono yang merupakan Bupati Kabupaten Tegal periode 2014-2019 sekaligus merupakan sebagai dalang, artinya adalah bahwa Ki Enthus Susmono akan mengatur laku Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal secara transformatif. Dengan demikian penulis membuat skripsi ini dengan judul “Kepemimpinan Transformasional Ala Dalang Wayang Ki Enthus Susmono (Bupati Kabupaten Tegal Periode 2014-2019)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan Ki Enthus Susmono sebagai Bupati Kabupaten Tegal periode 2014-2019 ?
2. Bagaimana Ki Enthus Susmono yang transformasional dapat menyesuaikan kebijakannya sebagai Bupati Kabupaten Tegal dengan kepemimpinan umum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana kepemimpinan yang dijalankan oleh Ki Enthus Susmono sebagai bupati Kabupaten Tegal periode 2014-2019 yang memiliki latar belakang seorang dalang wayang.
2. Mengetahui bagaimana Ki Enthus Susmono yang dianggap sebagai pemimpin transformatif menjalankan kepemimpinan umum sebagai Bupati Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepemimpinan bupati Kabupaten Tegal Ki Enthus Susmono yang memiliki latar belakang seorang dalang wayang.
2. Penelitian ini dapat memberikan referensi baru khususnya dalam kajian kepemimpinan.
3. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi khususnya dalam ranah kepemimpinan.

1.5. Kerangka Dasar Teori

1. Kepala Daerah

Pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai, berusaha untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang yang dipimpinnya serta memimpin orang-orang di jalan tersebut.⁷ Dalam bahasa arab, pemimpin disebut *imam*, yang berarti orang yang memimpin, karena perilakunya bisa diteladani orang lain dan memiliki visi yang jelas.⁸ Istilah lain pemimpin adalah *ulil amri* yang berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 59 :

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu”

Di Indonesia sendiri dalam konstitusinya, pemimpin pemerintahan disebut Presiden untuk Pemerintah Pusat, dan Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Untuk Pemerintahan Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin daerah disebut Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) yang memimpin pelaksanaan urusan

⁷ Fuad Nashori, Psikologi Kepemimpinan, Penerbit Pustaka Fahima, 2009, Yogyakarta, hal.30 dalam M. Alwi Wahyudi SH., M.Hum, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, Pustaka Pelajar, 2014, Yogyakarta, hal. 97

⁸ *Ibid*, hal.96

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Kepala Daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wali Kota. Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Daerah :

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah (dihapuskan sesuai UU No 9 Tahun 2015)
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Kepala Daerah :

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintahan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, maka segala bentuk sistem dan mekanisme pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur oleh Undang-Undang terutama setelah bangkitnya era reformasi di Indonesia. Beberapa kali pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru kini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut, secara garis besar

Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota memiliki sistem dan mekanisme yang sama dalam mengatur dan mengurus daerahnya, yang membedakan hanyalah wilayah kewenangannya saja.

Sesuai Undang-Undang, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) disebut urusan pemerintahan konkuren yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis. Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Dalam hal pembagian wilayah, Daerah Kabupaten atau Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Dalam hal urusan pemerintahan konkuren, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Selain aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, Pemerintah Daerah baik Provinsi, dan Kabupaten atau Kota memiliki hak untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah yang sekiranya diperlukan dengan catatan tidak keluar dari norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah juga harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni meliputi :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 5) Sosial

Urusan Pemerintah Wajib tersebut wajib diselenggarakan sebagai bentuk pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, terdapat Urusan pemerintahan Pilihan, yakni Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Adanya otonomi daerah bukan berarti Pemerintah Daerah dengan sebebas-bebasnya melakukan segala aturan ataupun kebijakan beserta implementasinya, namun dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga tetap harus berkoordinasi antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Pusat.

3. Kepemimpinan Transformasional

Hughes (2006) mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan yakni suatu fenomena yang kompleks yang melibatkan tiga hal utama, yakni pemimpin, pengikut, dan situasi. Merton (1969) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan hubungan interpersonal dimana orang-orang didalamnya melakukan tugasnya bukan karena perintah dari pemimpin, melainkan karena suatu keinginan. G. U. Cleeton dan C. W. Manson (1934) berpendapat bahwa kepemimpinan yaitu menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.⁹ Sejalan dengan itu, menurut Peter G. Northouse (2003) kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum.¹⁰ Individu yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang mana memiliki kewenangan untuk mempengaruhi banyak orang sehingga apa yang ingin dituju (kepentingan umum) dapat tercapai. Kepemimpinan juga dianggap sebagai kekuatan untuk

⁹ Inu Kencana Syafi'ie, M.Si, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia hal. 2.

¹⁰ Jurnal : Armanu Thoyib, Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi, dan Kinerja: Pendekatan Konsep.

menggerakkan dan memengaruhi orang serta sebagai alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Beberapa faktor dalam kepemimpinan yang dapat menggerakkan orang yaitu : ancaman, penghargaan, otoritas, dan, bujukan.¹¹

Kepemimpinan merupakan sebuah kombinasi antara keahlian dan praktik, sehingga sebuah kepemimpinan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalankan sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan juga tidak hanya ditemukan dalam sebuah komunitas atau organisasi dalam masyarakat, melainkan dapat ditemukan dan dilakukan dimanapun dan kapanpun. Setiap orang, dimanapun dan kapanpun dapat menjalankan sebuah kepemimpinan, hal ini yang disebut kepemimpinan adalah sebuah hubungan, maksudnya adalah kepemimpinan merupakan hubungan antara mereka yang terpanggil untuk memimpin dan mereka yang memilih untuk mengikuti.¹²

Kepemimpinan Transformasional sendiri memiliki beberapa definisi dan pandangan oleh beberapa peneliti. Transformasional yang dalam bahasa inggris adalah *to transform* berarti merubah sesuatu hal menjadi hal yang berbeda dari sebelumnya. Kepemimpinan transformasional pada awalnya didasarkan pada ide James McGregor Burns (1978) mengawali pemahaman tentang kepemimpinan transformasional yang mengedepankan nilai-nilai moral dari para pengikut dalam

¹¹ Veithzal Rivai, dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Rajawali Pers, 2012, hal. 2.

¹² James M. Kouzes dan Barry Z. Posner, *The Leadership Challenge*, terj. Revyani Sjahrial, Penerbit Erlangga, 2004, hal. 21.

upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi.¹³ Kepemimpinan transformasional menekankan pada proses dimana para pemimpin menyerukan nilai dan emosi para pengikut sebagai sebuah fitur sentral.

Bass (1985) mengusulkan gagasannya tentang kepemimpinan transformasional dengan menggunakan pendapat Burn sebagai pondasi. Bass mengatakan kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut dibandingkan dengan kepemimpinan yang lain (transaksional). Selain itu Bass juga mengemukakan efek dari kepemimpinan transformasional terhadap para pengikutnya dimana efeknya adalah adanya rasa kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Selain itu para pengikutnya tidak segan untuk melakukan hal yang lebih dari harapan awal. Pemimpin tersebut mentransformasi dan memotivasi para pengikut dengan :

- 1) Membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan,
- 2) Mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan diri sendiri,
- 3) Mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi¹⁴

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Anderson (1988), "*leadership means using power to influence the thoughts and actions of others in such a way that*

¹³ Gary A Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi, PT Indeks, 2009, hal. 290.

¹⁴ *Ibid*, hal. 305.

achieve high performance". Masih menurut Anderson, kepemimpinan transformasional juga diartikan sebagai visi perencanaan, komunikasi dan tindakan kreatif yang berdampak positif pada sekelompok orang dalam sebuah susunan nilai dan keyakinan yang jelas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas dan dapat diukur. Kepemimpinan transformasional ini mengarahkan pada loyalitas dan rasa hormat dari bawahan kepada atasan, sehingga segala bentuk tugas atau perintah dari atasan kepada bawahan akan dilaksanakan dengan penuh kesetiaan, bahkan rasa bangga.

Untuk mengetahui seorang pemimpin apakah seorang pemimpin menjalankan kepemimpinan transformasional atau bukan, Bass juga menentukan tiga komponen atau indikator sebagai sebuah patokan atau acuan untuk mengetahui sebuah kepemimpinan transformasional. Tiga komponen atau indikator tersebut adalah :

1. Pengaruh ideal (*Idealized Influence*). Pengaruh ideal berarti perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin.
2. Stimulasi intelektual (*Intellectual Stimulation*). Stimulasi intelektual adalah perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut akan permasalahan dan mempengaruhi para pengikut untuk memandang masalah dari perspektif yang baru.

3. Pertimbangan individual (*Individualized Consideration*). Pertimbangan individual memiliki arti bahwa seorang pemimpin dapat memberikan dukungan, dorongan, dan pelatihan bagi pengikut.

Selain ketiga komponen tersebut, Bass dan Avolio (1990) menambahkan satu komponen baru yakni motivasi inspirasional (*Inspirational Motivation*). Inspirasi didefinisikan sejauh mana seorang pemimpin mengkomunikasikan sebuah visi yang menarik, menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan, dan membuat model perilaku yang tepat. Ke empat komponen tersebut kemudian sering disebut *the Four I's*.¹⁵ Indikator-indikator tersebut dalam buku *Kepemimpinan dalam Organisasi* karya Gary Yukl disebut sebagai perilaku transformasional. Dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah kepemimpinan seseorang dikatakan kepemimpinan transformasional ditentukan oleh empat perilaku (komponen) yaitu pengaruh ideal, pertimbangan individual, motivasi inspirasional, dan stimulasi intelektual.

Kepemimpinan transformasional juga melibatkan unsur karisma dalam implementasinya. Bass (1985) menyebutkan karisma merupakan unsur kepemimpinan transformasional yang dibutuhkan, tetapi itu saja tidaklah mencukupi bagi proses transformasional.¹⁶ Kepemimpinan transformasional telah mencakup

¹⁵ Jurnal : *Kepemimpinan Transformatif Dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto*, Division of Leadership Research Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

¹⁶ Gary A Yukl. *Op.cit.*, hal. 306.

segala aspek jenis kepemimpinan yang efektif (baik dari segi perilaku maupun tindakan).

Agar semakin mendukung seorang pemimpin dapat menjalankan kepemimpinan transformasional, terdapat beberapa poin yang dapat membantu seorang pemimpin mengimplementasikan teori kepemimpinan transformasional. Poin-poin tersebut dikumpulkan menjadi sebuah pedoman untuk menjalankan kepemimpinan transformasional. Pedoman untuk kepemimpinan transformasional meliputi¹⁷ :

a) Menyatakan visi yang jelas dan menarik

Seorang pemimpin yang ingin menerapkan teori kepemimpinan transformasional harus membangun atau memperkuat sebuah visi. Visi yang jelas akan sangat membantu sebuah organisasi mencapai tujuan, sasaran, dan prioritasnya, atau akan menentukan seperti apa organisasi itu berjalan . Selain itu dengan adanya visi yang jelas juga akan membentuk sebuah rasa tujuan bersama yang kemudian visi tersebut akan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan atau keputusan.

Visi juga harus disampaikan dengan cara yang menarik. Dari mulai segi pemilihan kata hingga bagaimana visi tersebut dapat diketahui oleh khalayak. Dengan gaya dan bahasa yang persuasif dan menggunakan beberapa teknik seperti perumpamaan, simbol, ataupun slogan, maka visi tersebut akan mudah ditangkap dan menjadi daya tarik bagi masyarakat.

¹⁷ *Ibid*, hal. 315.

b) Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai

Seorang pemimpin yang transformatif akan meyakinkan kepada pengikut bagaimana visi tersebut memungkinkan untuk dicapai. Pemimpin akan membuat strategi-strategi yang dapat membuat pengikut percaya untuk mencapainya. Menurut Nadler (1988), akan lebih mudah strategi tersebut dilakukan jika menentukan tema jelas yang relevan dengan nilai bersama dari para anggota organisasi.

Pemimpin juga tidak perlu merasa tahu semua bagaimana strategi mencapai visi tersebut, tetapi akan lebih baik ketika para pengikut diberikan peran penting dalam melakukan strategi apa yang diperlukan. Strategi yang harus dilakukan pun bukan strategi yang konvensional, melainkan strategi yang mendatangkan keyakinan khususnya pada pemimpin terutama dalam kondisi krisis.

c) Bertindak secara rahasia dan optimis

Sebelum pemimpin memperlihatkan keyakinan terhadap visi yang akan dicapai, maka para pengikut tidak akan meyakinkannya. Dengan sikap yang optimis dari seorang pemimpin, maka akan timbul penularan sikap optimis tersebut dari para pengikut terutama optimis dalam mencapai keberhasilan, serta optimis untuk tetap berusaha menghadapi halangan ataupun kemunduran. Sikap optimis seorang pemimpin dapat dimunculkan dari perkataan yang disampaikan, atau tindakan yang dilakukan. Seorang

pemimpin transformatif tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang bersifat tak menentu seperti “Saya kira, barangkali, mungkin”, dan juga tidak boleh menampakan gerak tubuh yang memperlihatkan kelemahan seperti mengerutkan dahi, gugup, gemetar, ataupun memalingkan pandangan (menghindari kontak mata).

d) Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut

Seorang pengikut akan memiliki kinerja yang lebih baik ketika seorang pemimpin memiliki harapan dan keyakinan yang tinggi kepada pengikutnya. Seorang pemimpin akan mengingatkan kepada pengikut tentang bagaimana mereka dapat mengatasi halangan untuk mencapai keberhasilan. Selain itu pemimpin dapat melakukan analogi antarsituasi saat ini dengan keberhasilan dari tim atau unit organisatoris serupa. Pemimpin juga dapat menggambarkan kekuatan dan kelemahan para pengikut, dan juga meyakinkan bahwa mereka sama baik atau bahkan lebih baik dari yang lain.

e) Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai penting

Sebuah tindakan dramatis dan simbolis akan sangat diperlukan oleh seorang pemimpin transformatif. Para pengikut cenderung akan merasa jenuh dengan hal yang sudah biasa dilakukan. Tindakan simbolis untuk mencapai sebuah sasaran penting atau mempertahankan sebuah nilai penting akan lebih

mungkin memberikan pengaruh saat pemimpin itu membuat resiko kerugian pribadi yang cukup besar, membuat pengorbanan sendiri, atau melakukan hal-hal yang tidak konvensional.

f) Memimpin dengan memberikan contoh

Seperti dalam sebuah peribahasa “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, seorang pemimpin dituntut untuk menjadi panutan bagi pengikutnya. Apabila seorang pemimpin dapat memberikan contoh yang baik terhadap pengikutnya, maka pengikut tersebut akan menjadikan pemimpinnya contoh bagi dirinya untuk melakukan tugas.

Tindakan berbicara lebih keras daripada perkataan. Seorang pemimpin transformatif melakukan sebuah contoh terutama untuk hal yang tidak menyenangkan, berbahaya, tidak konvensional, atau kontroversial, sehingga pengikut terinspirasi untuk melakukannya juga. Memimpin dengan memberikan contoh disebut “pembuatan model peran”. Pemimpin transformatif akan menjadi tokoh yang selalu disorot oleh bawahan dalam setiap perilaku dan tindakan, tidak hanya dalam ranah kerja tetapi juga dalam hal sekecil apapun. Pemimpin transformatif akan menjadi teladan sehingga dia akan selalu berada di depan bawahannya, artinya dia akan melakukan sesuatu terlebih dahulu yang kemudian dapat diikuti oleh bawahannya.

Dalam memberikan contoh, seorang pemimpin transformatif harus mengedepankan dua poin penting, poin pertama yaitu membangun dan

memberi keyakinan terhadap nilai-nilai bersama, dan poin kedua adalah selaraskan tindakan dengan nilai.¹⁸ Poin pertama yaitu bagaimana seorang pemimpin membangun dan memberi keyakinan terhadap nilai-nilai bersama dan menjadikannya landasan. Dengan cara tersebut maka akan tercipta hubungan kerja yang produktif dan tulus, serta mengurangi adanya konflik yang disebabkan ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan antara pemimpin dan bawahan. Poin yang kedua yaitu bagaimana seorang pemimpin memberikan teladan dengan cara menyelaraskan antara tindakan dengan nilai-nilai bersama yang telah dibangun. Seorang pemimpin akan diukur konsistensinya terhadap perbuatan dan perkataannya.

g) Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi itu

Hal penting dalam pengimplementasian teori kepemimpinan transformasional oleh seorang pemimpin adalah pemberian kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai sebuah visi. Pemberian kewenangan ini disebut pendelegasian dimana pengikut baik secara individual maupun tim diberikan kesempatan untuk melakukan usaha yang terbaik untuk mencapai sebuah visi. Para pengikut akan memikirkan solusi terhadap suatu permasalahan serta bertanggungjawab terhadap usulan solusinya. Dengan begitu, memberikan kewenangan berarti memberikan sumber daya yang

¹⁸ James M. Kouzes dan Barry Z. Posner, *op.cit.*, hal. 81.

memadai bagi bawahan untuk menjalankan sebuah tugas di mana mereka diberikan tanggung jawab.

Memberikan kewenangan berarti melibatkan orang lain atau bawahan untuk turut serta terlibat dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan juga merupakan suatu tujuan yang harus dilakukan bersama bukan karena paksaan. Kepemimpinan adalah mengenai melibatkan orang lain sehingga mereka dapat melihat bagaimana ketertarikan dan aspirasi mereka sendiri sejalan dengan visi dan karenanya mereka dapat digerakkan untuk memberikan energi individual mereka dalam usaha merealisasikan visi tersebut.¹⁹

4. Kebijakan Publik

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (Negara kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.²⁰ Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-

¹⁹ *Ibid*, hal. 152.

²⁰ William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, 2000, Yogyakarta, hal. 51.

pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.²¹

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja Dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat Dan Daerah, bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Sedangkan pengertian kebijakan publik sendiri menurut peraturan ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Kebijakan atau *police* juga diartikan sebagai “*specific decisions about what role various lines of business in the organization will play and how resources will be allocated among them*” (keputusan spesifik tentang apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan bagaimana sumber daya dalam organisasi akan digunakan atau dialokasikan).²² Kebijakan publik secara sederhana diartikan sebagai apa yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah serta apa yang tidak dilakukan atau

²¹ Ibid, hal. 132.

²² Ulung Pribadi, Diktat Formulasi Kebijakan Publik, 2013.

tidak hendak dilakukan oleh pemerintah.²³ Menurut Thomas R. Dye (1989) dalam bukunya *Introducing Public Policy*, kebijakan publik adalah “*whatever government choose, to do or not to do*”, artinya kebijakan publik atau negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali.²⁴ Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diinternalisasikan bahwa setiap tindakan pemimpin atau kepemimpinan, baik melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan apapun merupakan suatu kebijakan yang nantinya akan berdampak pada kondisi masyarakat yang dipimpinnya.

1.6. Definisi Konseptual

1. Kepala Daerah

Kepala Daerah (pemerintah daerah) adalah unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Kepala Daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Wali Kota.

2. Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah terdiri dari Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Pemerintahan Daerah

²³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 2006, Yogyakarta, hal.82-83.

²⁴ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Negara (Kajian Ilmiah dan Kenegaraan)*, Pustaka Reka Cipta, 2013, Bandung, hal. 141.

memiliki wilayah administratif untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Kabupaten atau Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

3. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses antara pemimpin dan pengikut atau bawahan secara bersama-sama meningkatkan moralitas dan motivasi ke tingkat yang lebih tinggi (James McGregor Burns,1978). Selain itu James McGregor Burns (1978) mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional mengedepankan nilai-nilai moral dari para pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi. Kepemimpinan transformatif juga memiliki arti yaitu kepemimpinan yang berfokus pada gaya berkomitmen.²⁵

4. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan atau organisasi untuk mengikat pihak terkait sebagai instrument yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan publik secara sederhana diartikan sebagai apa yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah serta apa yang tidak dilakukan atau tidak hendak dilakukan oleh pemerintah.

²⁵ James M. Kouzes dan Barry Z. Posner, *op.cit.*, hal. 163.

1.7. Definisi Operasional

Untuk mengetahui apakah Ki Enthus Susmono menjalankan kepemimpinannya sebagai bupati menggunakan teori kepemimpinan transformasional, maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman tentang bagaimana kepemimpinan transformasional seharusnya dilakukan. Selanjutnya pedoman tersebut akan dijadikan sebagai indikator untuk melihat kepemimpinan Ki Enthus Susmono. Indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Indikator Kepemimpinan Transformasional

No	Indikator	Instrumen
1	Menyatakan visi yang jelas dan menarik	-Bagaimana cara Ki Enthus Susmono menyampaikan visinya kepada bawahan dan juga masyarakat -Dalam bentuk apa saja visi tersebut disampaikan
2	Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai	-Bagaimana Ki Enthus Susmono meyakinkan bawahan bahwa visi yang ada dapat dicapai -Apa strategi yang digunakan Ki Enthus Susmono sehingga visi tersebut dapat dicapai

3	Bertindak secara rahasia dan optimis	<p>-Apa saja tindakan yang dilakukan Ki Enthus Susmono yang dilakukan secara rahasia kepada bawahan</p> <p>-Bagaimana Ki Enthus Menularkan dan menjadikan bawahan berpikir dan bertindak optimis</p>
4	Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut	<p>-Bagaimana cara Ki Enthus Susmono memberikan harapan dan keyakinan kepada bawahan terutama disaat bawahan menghadapi kendala ataupun halangan dalam suatu pekerjaan</p>
5	Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai penting	<p>-Apa dan bagaimana tindakan simbolis yang dilakukan Ki Enthus Susmono kepada bawahan</p> <p>-Apa makna atau nilai dari tindakan-tindakan simbolis yang telah dilakukan Ki Enthus Susmono kepada bawahan</p>

6	Memimpin dengan memberikan contoh	<p>-Apakah Ki Enthus Susmono memberikan contoh dalam kepemimpinannya</p> <p>-Bagaimana Ki Enthus Susmono memberikan contoh kepada bawahan sehingga bawahan dapat terinspirasi dan dapat menjadi contoh dalam bekerja</p>
7	Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi itu	<p>-Apakah Ki Enthus Susmono melakukan pendelegasian kewenangan terhadap bawahan</p> <p>-Bagaimana Ki Enthus Susmono menjalankan fungsi pendelegasian terhadap bawahan</p>

1.8. Metodologi Penelitian

Sebagai langkah untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena, seorang peneliti akan melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mencari data dan fakta untuk dibuktikan. Penelitian diartikan sebagai *systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information (data) in order to increase our understanding of a phenomenon about which we are interested or concerned*²⁶ (proses sistematis terhadap pengumpulan, analisis, dan penafsiran informasi (data) dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang menarik atau yang menjadi perhatian kita). Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.²⁷

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa rangkaian proses guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Rangkaian tersebut terdiri dari menentukan jenis penelitian, jenis dan sumber data, unit analisa data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian

Seperti pada jamaknya penelitian sosial, pada penelitian tentang kepemimpinan Ki Enthus Susmono ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Bodgan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

²⁶ Paul D. Leedy dan Jeanne E. Ormod, *Practical Reaserch (planning and design)*, Pearson Education International, USA, 2010, hal . 2.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2010, hal. 6.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Selain itu Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data atau informasi hasil pengamatan secara deskriptif yakni menjelaskan dan menjabarkan data dan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata, gambar, ataupun dokumen-doukumen yang menunjang penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2009) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Kriyantono (2010) menambahkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan.³¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini data yang

²⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 3.

²⁹ *Ibid*, hal. 3.

³⁰ Diperoleh dari library.binus.ac.id, diakses pada 12 Agustus 2016.

³¹ *Ibid*, library.binus.ac.id.

diperoleh lebih komprehensif terkait kepemimpinan Ki Enthus Susmono selaku Bupati Kabupaten Tegal periode 2014-2019.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikoleksi oleh orang lain dan telah melalui proses statistik.³² Data sekunder menjadi sumber penunjang atau pelengkap dimana data sekunder ini digunakan untuk memperkaya hasil yang diperoleh dari data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti berita ataupun dokumen yang berasal dari media baik media cetak, media elektronik, maupun dokumen lain yang menunjang.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa data menurut Hamidi (2005) adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.³³ Unit analisa data dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Bupati Kabupaten Tegal periode 2014-2019, Ki Enthus Susmono. Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah tentang bagaimana Ki Enthus menjalankan tugas dan wewenangnya serta kebijakan apa saja yang dilakukan atau dikeluarkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan sumber dan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan

³²Metode Pengumpulan data, diakses melalui https://www.academia.edu/8024955/METODE_PENGUMPULAN_DATA pada Sabtu, 13 Agustus 2016, pukul 07.42.

³³ Bab II Metode Penelitian, diakses melalui [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25944/4/Chapter % 20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25944/4/Chapter%20II.pdf) pada Selasa, 15 Agustus 2016, pukul 09.17.

dan sesuai. Pada penelitian tentang kepemimpinan Ki Enthus Susmono ini teknik yang dilakukan adalah *interview* atau wawancara dan dokumentasi.

a) *Interview* atau Wawancara.

Interview atau wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dengan maksud tertentu. Tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba (1985) antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.³⁴

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada sumber data primer yang sekiranya diperlukan untuk memenuhi data yang diperlukan seperti wawancara langsung kepada Ki Enthus Susmono, bagian protokoler bupati, ataupun narasumber lain.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen baik berupa tulisan, gambar, rekaman suara atau video dari berbagai media. Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.³⁵

Dalam penelitian terkait kepemimpinan Ki Enthus Susmono, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen seperti

³⁴ Lexy J. Moloeng, *op.cit.*, hal. 136.

³⁵ *Ibid*, hal. 161.

buku, surat kabar, rekaman video, dan teknik dokumentasi lainnya yang dapat memberikan informasi terkait kepemimpinan Ki Enthus Susmono.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data digunakan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁶ Untuk menganalisa data yang sudah didapat, maka peneliti akan menggunakan teknik analisa data sebagai berikut³⁷ :

a) Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.

b) Penyajian Data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari segala gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi.

³⁶ *Ibid*, hal. 103.

³⁷ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Penerbit Tiara Wacana, 2006, Bandung, hal. 22-23 .

1.9. Rencana Sistematika Bab

Pada penelitian ini perlu menyusun rencana sistematika penulisan bab sehingga penulisan penelitian ini akan lebih teratur. Rencana penulisan sistematika bab terdiri dari :

a) Bab I Pendahuluan

Pada bab I tentang pendahuluan penelitian ini, penulis menjabarkan tentang latar belakang masalah yaitu tentang permasalahan kepemimpinan khususnya di tingkat kepala daerah, serta potensi munculnya kepemimpinan transformasional di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya pada bab I ini penulis menjelaskan tentang rumusan masalah terkait penelitian yang akan dilakukan, kemudian menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bab I ini juga berisi tentang kerangka dasar teori yang digunakan peneliti yang digunakan sebagai acuan penelitian.

Bagian lain yang terdapat pada bab I adalah definisi konseptual dan definisi operasional. Selain itu, pada bab I terdapat metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, unit analisa data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Pada bagian akhir bab I terdapat bagian rencana sistematika bab yang mana pada bagian ini menjelaskan tentang susunan penulisan bab dari awal hingga akhir sehingga penelitian untuk skripsi ini akan tersusun dengan baik.

b) Bab II Deskripsi Objek Penelitian

Bab selanjutnya dalam skripsi ini adalah bab II yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang objek yang digunakan untuk penelitian. Objek utama penelitian ini adalah Bupati kabupaten Tegal periode 2014-2019, Ki Enthus Susmono. Untuk melengkapi data agar lebih komprehensif, maka data yang dicari dalam penelitian ini tidak hanya tentang bagaimana kepemimpinan Ki Enthus Susmono, tetapi juga tentang gambaran secara luas mengenai biografi Ki Enthus Susmono, serta mengenai mendeskripsikan Kabupaten Tegal terutama dari segi politik dan pemerintahan.

c) Bab III Analisis Kepemimpinan Ki Enthus Susmono

Pada bab III skripsi ini akan memaparkan tentang analisis yang telah dilakukan penulis mengenai kepemimpinan Ki Enthus Susmono yang bersumber dari data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis ini akan dikerucutkan mengenai kepemimpinan transformasional Ki Enthus Susmono.

d) Bab IV Penutup

Pada bagian terakhir skripsi ini, terdapat bab IV yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang penjelasan secara singkat dari keseluruhan hasil penelitian dari kepemimpinan Ki Enthus Susmono selaku Bupati Kabupaten Tegal periode 2014-2019. Kemudian pada bagian saran berisikan tentang saran atau masukan oleh penulis khususnya

kepada Ki Enthus Susmono selaku Bupati Kabupaten Tegal terutama dalam hal kepemimpinan transformasional. Selain itu saran juga secara umum diberikan kepada Pemerintahan kabupaten Tegal.